

Laporan Penelitian

ANALISIS SOSIAL PENGEMBANGAN FEDERASI
SERIKAT PEREMPUAN MERDEKA

Oleh:

Sakti Ritonga, S.Ag, M.Pd

Konsultan

Prof. Dr. Amroeni, M.Ag



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN
2016

Laporan Penelitian

ANALISIS SOSIAL PENGEMBANGAN FEDERASI
SERIKAT PEREMPUAN MERDEKA

Oleh:

Sakti Ritonga, S.Ag, M.Pd

Konsultan

Prof. Dr. Amroeni, M.Ag



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT. dan Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW atas selesainya penulisan laporan penelitian ini. Laporan penelitian yang berjudul Analisis Sosial Pngembangan Federasi Serikat Perempuan Merdeka ini diperutukkan memenuhi salah satu persyaratan untuk mengajukan usul kenaikan pangkat dan golongan.

Tidak terdapat banyak perubahan pada temuan awal ketika penelitian ini dilakukan. Meskipun dilakukan juga penempurnaan dalam teknis penulisan serta penyederhanaan isi laporan penelitian, Dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Amroeni, M.Ag selaku konsultan pelaporan penelitian.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa laporan penelitian yang telah dilakukan masih memiliki keterbatasan.

Medan, Desember 2016
Penulis,

Sakti Ritonga

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| A. Berdirinya Perempuan Persepsi Perempuan | 13 |
| B. Analisis Perkembangan Persepsi Perempuan | 13 |
| Halaman | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 2 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 3 |
| E. Tinjauan Pustaka | 3 |
| 1. Eksistensi Organisasi Perempuan di Indonesia | 3 |
| 2. Analisis Perspektif Feminisme | 5 |
| 3. Kajian Kepustakaan Penelitian yang Relevan | 7 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Latar Penelitian | 8 |
| 2. Entri | 8 |
| 3. Kehadiran Peneliti | 8 |
| 4. Alasan Penggunaan Metode Kualitatif | 8 |
| 5. Sumber dan Jenis Data | 9 |
| 6. Metode Pengumpulan Data | 10 |
| 7. Teknik Analisis dan Penafsiran Data | 10 |
| 8. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 11 |

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Maksud dan Tujuan Penelitian 2

C. Ruang Lingkup Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 3

E. Tinjauan Pustaka 3

F. Metode Penelitian 3

1. Jenis Penelitian 3

2. Lokasi 3

3. Waktu Penelitian 3

4. Teknik Pengumpulan Data 3

5. Teknik Analisis Data 3

6. Teknik Pengolahan Data 3

BAB II TEMUAN PENELITIAN 13

- A. Berdirinya Federasi Serikat Perempuan Merdeka 13
- B. Analisis Pengembangan Federasi Serikat Perempuan Merdeka 20

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 23

- A. Kesimpulan 23
- B. Saran 24

DAFTAR KEPUSTAKAAN 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari organisasi gerakan perempuan yang memiliki basis kaum perempuan terbesar di Sumatera Utara hingga saat ini adalah Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM). Diawali proses pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan dampingan yayasan Hapsari (Perbaungan) sejak tahun 1990, muncullah kesepakatan untuk membangun sebuah organisasi perempuan bernama Serikat Perempuan Independen (SPI), yang didirikan tanggal 16 September 1999.

Sebagai organisasi massa perempuan, FSPM beranggotakan kaum perempuan yang berasal dari sektor perempuan petani, buruh tani, buruh perkebunan, nelayan, dan pedagang kecil di pedesaan. Organisasi massa perempuan ini didirikan dengan cita-cita (visi) untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada penindasan antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kerja tanpa kekerasan, kerelawanan, keterbukaan, dan semangat persaudaraan sesama kaum perempuan.

Pada proses perjalanan SPI berikutnya, berdasarkan berbagai analisis dan pertimbangan akhirnya SPI melebur dengan Hapsari. Meleburnya SPI dengan Hapsari didasarkan pada hasil rapat kerja pembangunan organisasi yang disahkan melalui kongres SPI tanggal 8 sampai 10 Oktober 2001.

Secara organisatoris, kedua organisasi perempuan tersebut melebur dan memilih bentuk federasi dengan nama Hapsari-Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM). Saat disepakatinya pendirian federasi ini, organisasi perempuan yang telah menjadi anggotanya adalah: SPI Deli Serdang, SPI Labuhanbatu, SPI Simalungun, Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang, dan Perserikatan Orientasi Wanita dan Anak (OWA) Palembang.

Dipilihnya organisasi massa perempuan ini berdasarkan alasan, terdapat kecenderungan pandangan selama ini bahwa organisasi perempuan yang menjadi subjek penelitian hanya yang berada di wilayah perkotaan. Studi yang ada selama ini kebanyakan hanya mengungkap permasalahan gerakan kaum perempuan di perkotaan. Penelitian difokuskan pada permasalahan analisis terhadap bentuk organisasi massa perempuan ini sebagai sebuah federasi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ada dua pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka ?
2. Mengapa organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka berkembang sebagai federasi ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan analisis Federasi Serikat Perempuan Merdeka sebagai organisasi massa perempuan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan latar belakang berdirinya organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka.
2. Menemukan dasar analisis pengembangan organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka.

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka.
2. Untuk pendalaman dasar analisis pengembangan organisasi massa perempuan Federasi Serikat Perempuan Merdeka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Eksistensi Organisasi Perempuan di Indonesia

Di Indonesia, sebagai salah satu negara Dunia Ketiga, terdapat berbagai organisasi perempuan dengan coraknya yang khas. Harsono (dalam Abdullah, 1997:272) menemukan ada beberapa front perjuangan peningkatan status dan martabat kaum perempuan di Indonesia, yang dibaginya dalam tiga kubu organisasi perempuan yaitu: (1) organisasi pemerintah, seperti Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi, dan lain-lain; (2) organisasi nonpemerintah (Omop) yang

terdiri dari Kowani (divisi perempuan dari organisasi masyarakat dan agama); dan (3) LSM-LSM perempuan di seluruh Indonesia.

Organisasi seperti Dharma Wanita, PKK, dan Dharma Pertiwi merupakan organisasi kaum perempuan yang dianggap resmi oleh pemerintah dan mendapat kebebasan penuh dalam menyusun upaya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Adapun organisasi semisal Kowani (Kongres Wanita Indonesia) merupakan organisasi untuk menggalang partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di luar atau bukan bentuk pemerintah. Tetapi mereka relatif mendapat kebebasan dalam aktivitasnya.

Sedangkan LSM-LSM perempuan termasuk kategori Ortop seperti Kowani. Bedanya, mereka kurang mendapat kebebasan dalam beraktivitas dibandingkan dengan Kowani. Ketiga front organisasi tersebut berbeda-beda dalam memandang isu-isu perempuan terkait dengan pembangunan.

Dua kubu pertama (organisasi pemerintah seperti Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi, dan organisasi nonpemerintah semisal Kowani) penekanannya lebih pada bagaimana menjadi seorang perempuan yang ideal sekaligus pendukung karir suami. Arah pengembangan perempuan ditujukan dalam rangka berpartisipasi untuk menyukseskan proses pembangunan. Bukan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan kepentingan kaum perempuan. Bagi kubu pertama di atas, persoalan keterbelakangan perempuan dipandang dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Sedangkan bagi kubu kedua (LSM-LSM perempuan), organisasi ini berangkat dari isu-isu dan persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan. Dengan tujuan, agar kaum perempuan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) terhadap kondisi dan dampak dari pembangunan.

2. Analisis Perspektif Feminisme

Umumnya organisasi perempuan bergerak dari kesadaran, asumsi terhadap diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan bagi kaum perempuan, tetapi masing-masing mereka memiliki argumen tersendiri dalam melihat akar ketidakadilan dan bagaimana strategi gerakannya. Sedikitnya ada empat perspektif feminisme yang mengilhami bagi ideologi dan paradigma gerakan perempuan dunia (terutama Dunia Ketiga) kini, yaitu:

Pertama, feminisme Liberal. Ollenburger dan Moore (1996:21) menerangkan bahwa bagi kaum feminisme liberal penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh kurangnya kesempatan dan pendidikan kaum perempuan baik secara individual ataupun kelompok. Sebagaimana dijelaskan Fakih (2001:152) feminisme liberal menawarkan pemecahan proses marginalisasi perempuan dengan jalan melakukan perubahan hukum dan peraturan serta membuka peluang bagi kaum perempuan supaya mempunyai akses dan kontrol yang sama atas pekerjaan dan imbalan ekonomi. Tujuan perjuangan kaum feminisme liberal adalah mendorong partisipasi yang adil di dalam sistem yang ada, bukan melakukan perubahan atas sistem itu sendiri.

Kedua, Feminisme Marxis. Bagi feminisme Marxis, ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Mereka memandang tidak mungkin kaum perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki jika mereka masih hidup dalam sebuah sistem masyarakat yang berkelas.

Ketiga, Feminisme Radikal. Hidayati (dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1992:12) menyatakan jika feminisme Marxis menitikberatkan permasalahan perempuan dikaitkan dengan pekerjaan perempuan, maka feminisme radikal menitikberatkan perhatiannya pada permasalahan perempuan dalam hal reproduksi dan seksualitas mereka. Perspektif ini berangkat dari asumsi ideologi patriarki, yaitu sistem kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga sebagai dasar keterbelakangan perempuan. Supaya perempuan terbebas dari sistem penindasan yang ada, maka harus dilakukan perubahan terhadap sistem masyarakat yang patriarki tersebut. Gerakan kaum feminis radikal melihat bahwa segala sifat maskulin itu ada sebagai akibat langsung dari dominasi kaum lelaki. Karena itu, dominasi tersebut harus direbut untuk kemudian dihapuskan, demikian menurut Hadar (dalam *Jurnal Perempuan*, 2001:96).

Keempat, Feminisme Sosialis. Hadar (dalam *Jurnal Perempuan*, 2001:96) menyatakan bahwa tujuan gerakan feminisme Sosialis adalah, menyatakan dirinya dalam gerakan untuk mewujudkan sistem sosial yang lebih adil baik secara politik, ekonomi, maupun kebudayaan, tidak hanya bagi kaum perempuan tetapi juga bagi laki-laki.

3. Kajian Kepustakaan Penelitian yang Relevan

Mar'iyah menyatakan bahwa organisasi gerakan perempuan di Indonesia sangat heterogen, dan sekali lagi tergantung pada isu yang dikembangkannya. Persoalan penting kemudian adalah, tidak semua kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang persoalan perempuan bergerak sebagai sebuah gerakan perempuan. Dengan kata lain, banyak organisasi perempuan tidak secara langsung menjadi organisasi gerakan perempuan. Terutama jika penggunaan wacana peran perempuan dalam keluarga masih menjadi titik tekan dari kelompok atau organisasi perempuan tersebut (dalam *Jurnal Analisis Sosial*, 2001:58).

Suryochondro (1984) menemukan bahwa organisasi-organisasi perempuan sebagai kelompok sosial tidak lepas dari pengaruh dan perkembangan masyarakat di sekelilingnya. Ternyata bidang politiklah yang memberi pengaruh (positif atau negatif) yang terbesar. Ia juga menemukan bahwa gerakan perempuan di Indonesia disebabkan oleh perkembangannya dalam sejarah belum mengemukakan tuntutan secara eksplisit. Artinya belum memiliki ideologi dan paradigma yang jelas.

Refleksi yang dilakukan oleh Fakhri (1996) tentang pergolakan organisasi gerakan sosial di Indonesia khususnya LSM pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sampai pada kesimpulan bahwa organisasi gerakan perempuan masih memiliki ideologi dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang persoalan kaum perempuan di Indonesia. Karenanya paradigma dan pendekatan yang digunakan juga masih belum menemukan titik sinergi di antara organisasi-organisasi perempuan yang ada tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa kabupaten di Sumatera Utara, antara lain Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Labuhanbatu. Sebab wilayah kerja Federasi Serikat Perempuan Merdeka ini berada di beberapa kabupaten. Penelitian ini dilakukan pada kelompok-kelompok perempuan yang menjadi anggotanya.

2. Entri

Peneliti telah bergabung dengan Dewan Pengurus Harian (DPH) dan Dewan Pengurus Federasi (DPF) dalam proses mengumpulkan informasi dan bahan penelitian lainnya. Peneliti berperan layaknya sebagai pengurus yang beraktifitas di kantor Federasi Serikat Perempuan Merdeka.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sudah diketahui dan diterima oleh pengurus ketika melakukan *grand tour* pada beberapa bulan sebelum tahun 2007 yang lalu. Lamanya proses analisis penelitian lapangan terhitung mulai saat laporan penelitian ini di analisis kembali sekitar 2 bulan.

4. Alasan Penggunaan Metode Kualitatif

Hal yang ingin dilakukan dalam studi ini adalah untuk mendiskripsikan tentang gerakan Federasi Serikat Perempuan Merdeka dari sudut pandang dalam. Difokuskan pada permasalahan perspektif feminisme dengan latar a amiah yang utuh dan mendalam. Selanjutnya, dari deskripsi tersebut ingin ditemukan penjelasan kultural-sosiologis dari fokus penelitian. Karena tujuan tersebut, maka

relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Sumber dan Jenis Data

Informan awal dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, di antaranya: ketua umum Federasi Serikat Perempuan Merdeka, sekretaris, Dewan Pengurus Harian (DPH), Dewan Pengawas Organisasi (DPO), Eksekutif Federasi (DEF), pengurus dan anggota kelompok Federasi Serikat Perempuan Merdeka. Dengan pertimbangan mereka mengetahui dan mengalami langsung peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Bila dalam proses pengumpulan data untuk menemukan masalah yang menjadi fokus penelitian ini tidak muncul variasi informasi, maka pencarian informasi dihentikan atau tidak mencari informasi dari informan baru. Jika terdapat variasi data atau data belum memadai, dilanjutkan mencari informasi dengan memilih informan yang baru (*snowball sampling*).

Sumber dan data utama diarahkan pada kata-kata dan kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Secara rinci jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung adalah:

1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata, peristiwa, dan tindakan informan yang diwawancarai atau diamati yang berkenaan dengan fokus, merupakan sumber data utama.
2. Sumber tertulis. Sumber data tertulis di antaranya adalah: dokumen resmi Anggaran Dasar Federasi Serikat Perempuan Merdeka, laporan pertemuan kelompok, hasil konsultasi program.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan selama berada di lapangan dan dalam proses penelitian adalah:

1. Pengamatan berperanserta (*Participant Observation*). Ada tiga tahap observasi yang dilakukan di lapangan yaitu observasi deskriptif, terfokus, dan terseleksi.
2. Wawancara. Wawancara yang dilakukan pada anggota Federasi Serikat Perempuan Merdeka umumnya tidak terstruktur, bebas, dan terbuka.
3. Penggunaan bahan dokumen. Catatan-catatan dan dokumen yang mereka buat sangat membantu tersedianya informasi yang dibutuhkan. Catatan dan dokumen-dokumen yang dimanfaatkan seperti Anggaran Dasar Federasi Serikat Perempuan Merdeka, program kerja organisasi yang telah ditetapkan, notulensi rapat, hasil laporan program yang ditemukan di lapangan.

7. Teknik Analisis dan Penafsiran Data

Merujuk pada uraian Faisal (1990:90) teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah: (1) analisis domain (*domain analysis*) untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu fokus masalah; (2) analisis taksonomi (*taxonomic analysis*) pada analisis ini fokus ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus; (3) analisis komponensial (*componential analysis*) pada analisis taksonomi tujuan utamanya adalah struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain. Adapun pada analisis komponensial, yang diorganisasikan bukan kesamaan elemen dalam

domain, melainkan kontras antarelemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi atau wawancara; (4) analisis tema kultural (*discovering cultural themes*); (5) analisis komparasi konstan (*grounded theory research*) peneliti bertujuan mengembangkan teori atas dasar data yang dikumpulkan.

Secara umum, langkah-langkah penelitian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini berpedoman pada model Spradley (1980) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, yaitu: (1) menentukan situasi sosial, (2) melakukan observasi lapangan, (3) melakukan analisis kawasan, (4) melaksanakan observasi terfokus, (5) melakukan analisis taksonomi, (6) melakukan observasi terseleksi, (7) melakukan analisis komponensial, (8) melakukan analisis tema budaya, dan (9) menulis laporan penelitian.

8. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan selama penelitian berlangsung didasarkan pada empat tipe standar atau kriteria utama, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Faisal, 1990:31), Muhadjir (1996:126), yaitu:

1. Standar kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang memiliki derajat kepercayaan yang tinggi dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu: (a) perpanjangan keikutsertaan dalam aktivitas, (b) melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, (c) melakukan triangulasi (metode, sumber, teori) untuk mendapatkan informasi dengan versi yang dikeluarkan masing-masing pihak, (d) melibatkan teman sejawat yang tidak berperan serta melalui diskusi, (e) melakukan analisis kasus negatif, (f) melacak kesesuaian

segenap hasil analisis data, (g) mengecek kesesuaian hasil wawancara, observasi, interpretasi, dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.

2. Standar transferabilitas. Pembaca diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peta permasalahan. Kemudian, bagaimana hasil penelitian terhadap kasus ini dapat ditransfer keberlakuannya pada latar lain yang setipologi dengan latar penelitian ini. Teknik untuk memenuhi standar tersebut dilakukan dengan memperkaya deskripsi tentang latar atau konteks dari situasi sosial (*social setting*).
3. Standar dependabilitas. Teknik yang digunakan untuk memenuhi standar ini ialah melakukan audit dependabilitas. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa auditor yang independen (dalam penelitian ini adalah konsultan peneliti) dengan jalan melakukan review terhadap segenap jejak aktivitas penelitian.
4. Standar konfirmabilitas. Konfirmabilitas berarti dapat dikonfirmasi. Standar ini memiliki kemiripan dengan standar dependabilitas yang berkaitan dengan mutu hasil penelitian dengan memperhatikan bantuan catatan, rekaman, data lapangan (hasil audit dependabilitas) dan koherensi internalnya dalam penyajian interpretasi serta kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian. Audit konfirmabilitas dilakukan secara bersama dengan proses audit dependabilitas.

BAB II

TEMUAN PENELITIAN

A. Berdirinya Federasi Serikat Perempuan Merdeka

Kemunculan Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) tidak dapat dipisahkan dari Serikat Perempuan Independen (SPI) dan yayasan Hapsari. Dapat dikatakan bahwa pada mulanya SPI sebagai anggota federasi adalah kelompok-kelompok perempuan dampingan yang diorganisir oleh yayasan ini. Hapsari pada awalnya merupakan LSM yang menitikberatkan program kerjanya pada upaya advokasi isu perempuan di Sumatera Utara.

Hapsari didirikan pada tahun 1990 di desa Sukasari dusun V kecamatan Perbaungan, Deli Serdang sebelum menjadi kabupaten baru yang bernama Serdang Bedagai saat ini. Secara historis, Hapsari muncul diawali oleh adanya proyek pembinaan kelompok remaja PKBI Medan. Di mana setiap kelompok remaja yang telah dibentuk, ada tutor pendamping yang kemudian akan melanjutkan kegiatan kelompok. Di antara nama pendiri Hapsari adalah: Lely Zailani, Neni Dwiyani (pelaksana program), dan Abd. Kholiq (ketua badan pengurus). (Wahana Informasi Masyarakat, 1994: 42).

Pada tahun 1997, Hapsari menjadi sebuah yayasan yang memiliki titik tekan pada upaya pemberdayaan perempuan. Dalam perjalanannya yang panjang, proses pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan dampingan Hapsari sejak tahun 1990 sampai tahun 1999, akhirnya memunculkan pemikiran untuk terwujudnya sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan bersama. Melalui

A. Berdirinya Serikat Perempuannya Mandala

Komunitas Perempuannya Mandala (KPM) telah dalam
 organisasi dan Serikat Perempuannya Mandala (SPM) dan
 dibentuk pada tahun 1997 sebagai organisasi yang
 kelompok perempuan yang bergerak oleh sistem ini
 swasaya merupakan LSM yang melaksanakan program
 organisasi ini berpusat di Sumatera Utara.

Hal ini dibentuk pada tahun 1990 di desa Sekeloa dan
 Kabupaten Deli Serdang sebagai organisasi yang
 Serikat Perempuannya Mandala (SPM) dan
 proyek pembinaan kelompok rumah PKSI Medan. Di
 konsep yang telah dibesarkan dan antar kelompok yang
 organisasi kelompok. Di antara lain pada tahun 1997
 Kellom, Nur Dwiyan (pembina program) dan Abd. Kadir (pembina
 pengurus) (Wahana Informasi Masyarakat, 1991: 42).

Terdapat tahun 1997, hal ini menjadi salah satu
 dan pada upaya pemberdayaan perempuan dalam
 proses pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan
 sejak tahun 1990 sampai tahun 1997, sehingga
 terwujudnya salah satu organisasi sebagai salah satu

lokakarya Membangun Organisasi Perempuan, yang dihadiri oleh utusan
 kelompok-kelompok perempuan (Labuhanbatu, Langkat, dan Simalungur.)
 disepakati untuk membangun organisasi dari, oleh, dan untuk kaum perempuan
 yang diberi nama Serikat Perempuan Independen (disingkat SPI).

Secara resmi SPI didirikan pada tanggal 16 September 1999. Adapun
 deklarasi berdirinya SPI dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di halaman
 kantor gubernur Sumatera Utara. Deklarasi pendirian tersebut dihadiri oleh 500-an
 orang kaum perempuan anggota dan simpatisan SPI yang berasal dari lima
 kabupaten, yaitu: Deli Serdang, Asahan, Langkat, Simalungun, dan Labuhanbatu
 (dalam *Suara Hapsari*, 2000:3).

Sebagai organisasi massa perempuan, SPI mencoba menghimpun dan
 membangun semangat persaudaraan sesama kaum perempuan pedesaan. Merujuk
 pada visi awal didirikannya perserikatan ini, SPI didirikan dengan cita-cita, yaitu
 terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada penindasan antara
 perempuan dan laki-laki dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap
 hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

SPI merupakan organisasi massa perempuan pedesaan yang wilayah
 kerjanya berada di Sumatera Utara, beranggotakan kelompok-kelompok
 perempuan pedesaan dari sektor petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh
 perkebunan. Mengapa organisasi ini menghimpun kaum perempuan pedesaan
 didasarkan pada pertimbangan, bahwa mereka selama ini (perempuan desa)
 mayoritas mengalami penindasan, dan belum mempunyai keberanian untuk
 mengungkapkan hak-haknya selama ini.

Sebagai perserikatan, SPI terus berproses untuk menuju kemandiriannya. Sampai dengan tahun ketiga berdirinya (1999-2001), SPI telah bekerjasama serta mendapatkan dukungan moral dan material penuh dari Hapsari. Hampir seluruh sumber daya dan dana yang dibutuhkan bagi kemunculan SPI berasal dari Hapsari. Akan tetapi, proses perjalanan bersama sejak didirikannya SPI dirasakan penting akan adanya perubahan bentuk dan mekanisme kepengurusan organisasi agar tidak tumpang tindih, tidak sentralistik, serta tidak meminggirkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Di samping itu, muncul pemikiran akan lahirnya sebuah organisasi yang lebih aspiratif bagi kepentingan anggotanya (dalam *Suara Hapsari*, 2001:2).

Tuntutan hal-hal tersebut dirasakan semakin urgen tatkala mengacu pada analisis situasi sosial, politik, hukum, dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia yang menginginkan dan mengharuskan adanya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, adanya kemajuan berpikir, berproses, dan bertindak dari kaum perempuan anggota SPI khususnya juga kemajuan pergerakan kaum perempuan pada tingkat nasional dan internasional, terbukanya ruang partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan.

Pertimbangan berikutnya, mengacu pada tujuan awal pendirian Hapsari dan SPI, keduanya sama-sama memiliki cita-cita untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan setara, mendapat dukungan serta mengakar pada masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut pada satu wilayah kerja yang sama, dibutuhkan sebuah sistem dan mekanisme organisasi yang tepat, supaya distribusi sumberdaya lokal mampu lebih diberdayakan. Karena beberapa pertimbangan

tersebut, perlu dibangun pola hubungan kerja yang lebih demokratis, otonom, dan membuka peluang bagi munculnya kepemimpinan individu perempuan sesuai dengan prinsip independensi yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil rapat kerja pembangunan organisasi tanggal 27 Agustus sampai dengan 4 September 2001, yang kemudian disahkan dalam kongres SPI tanggal 8 sampai 10 Oktober 2001 di hotel Sahid Medan, disepakati bahwa SPI dan Hapsari melebur menjadi organisasi berbentuk federasi, dengan nama (sementara) Federasi Serikat Perempuan Independen Sumatera Utara.

Pada kongres tersebut, hadir 47 orang kaum perempuan sebagai utusan perwakilan dari lima organisasi perempuan yang bersedia menjadi anggota federasi, yaitu: (1) Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Serdang, (2) Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu, (3) Serikat Perempuan Independen (SPI) Simalungun, (4) Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang, (5) Perserikatan Orientasi Wanita dan Anak (OWA) Palembang, serta ditambah dengan dua orang utusan dari kabupaten Langkat (dalam *Suara Hapsari*, 2001:6).

Dengan meleburnya Hapsari dengan SPI menjadi federasi, maka segala hal yang terkait masalah institusional dan administrasi secara legal formal maupun sosial, serta proses perkembangan berikutnya ditangani oleh sebuah komite yang diangkat oleh kongres dengan nama Komite Persiapan Pendirian Federasi (KPPF). Anggota komite persiapan itu terdiri dari: Lely Zailani, Mardiana Andi, Rusmiani Saragih, Sutini, Julfa, Asriyanti, dan Rusmawati.

Setelah bekerja satu bulan, komite persiapan federasi menggelar kongres pertama di Lubuk Pakam pada tanggal 8 sampai 11 November 2001, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan federasi (Anggaran Dasar, program, struktur, dan pemilihan pengurus). Dengan pelaksanaan kongres tersebut, maka KPPF pun dibubarkan atas persetujuan kongres.

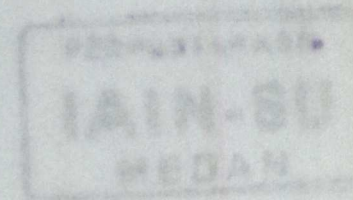
Prosesi kongres I yang paling menentukan itu melalui tahap-tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, pembukaan kongres dilakukan pada hari Kamis 8 November 2001. Pada Kongres I tersebut dari SPI Labuhanbatu hadir nama-nama kaum perempuan seperti: Syafrida Hasibuan, Mastarina Marpaung, Ningsih, Srihartini, Suratni, Wati, Seniwati, Yusri Hanisyah, dan Sutini di antara anggota federasi lainnya. Hal ini terlihat dari daftar hadir Kongres I tersebut.

Acara pembukaan hanya berisi tentang penjelasan proses kongres, perkenalan, membahas jadwal, materi, dan tata cara persidangan. Kemudian, Jum'at tanggal 9 November 2001 tepat pukul 09.00, setelah memilih pimpinan dan sekretaris sidang dan pembentukan komisi, dilakukan sidang komisi-komisi yang dilanjutkan dengan sidang pleno. Komisi anggaran dasar menyetujui perubahan nama federasi dari kata independen menjadi merdeka. Atau lengkapnya menjadi Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM). Sedangkan kata Sumatera Utara dipertanyakan, karena anggota federasi tidak semuanya berasal dari Sumatera Utara, termasuk soal nama Hapsari.

Peserta kongres sempat tarik menarik dalam menetapkan nama federasi. Ada yang bersikeras tetap mengikutkan nama Hapsari dengan alasan, sejarah SPI yang tidak bisa dipisahkan dari Hapsari, juga demi pertimbangan internal dan eksternal lembaga. Sebaliknya, ada yang beralasan bahwa telah disepakati bentuk federasi sesuai dengan hasil kongres I SPI di Medan.

Akhirnya, peserta melakukan *voting* dalam menentukan nama federasi. Dari hasil *voting*, akhirnya nama yang terpilih adalah Hapsari-Federasi Serikat Perempuan Merdeka (sebanyak 23 suara) dari 39 orang. Kedua, pada hari dan tanggal yang sama dilakukan pembahasan komisi Anggaran Dasar. Beberapa hasil penting pada sesi tersebut adalah, hasil-hasil pembahasan untuk draft anggaran dasar peserta menyetujui pasal-pasal yang diajukan kecuali soal logo yang diputuskan mesti ditetapkan pada pembahasan anggaran rumah tangga.

Ketiga, sidang pleno komisi program juga pada tanggal dan hari yang sama menghasilkan beberapa keputusan penting program federasi yang disahkan kongres, yaitu: (1) pendidikan HAM/HAP untuk masyarakat, (2) pendidikan untuk penguatan keanggotaan (pendidikan gender dan analisis sosial, pendidikan reproduksi perempuan, pendidikan politik, hukum dan kewarganegaraan, pendidikan manajemen keorganisasian, magang dan studi banding), (3) penambahan anggota dan perluasan wilayah, (4) penguatan jaringan nasional dan internasional, (5) kampanye dan penerbitan, (6) penguatan kelembagaan, (7) pembelaan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan, (8) peningkatan ekonomi anggota, (9) pembuatan *data base*.



Keempat, masih pada hari dan tanggal yang sama membahas tentang struktur organisasi menetapkan ketentuan struktur federasi: kongres, mengangkat dewan eksekutif federasi (DEF), DEF membentuk divisi-divisi. Fungsi pengawasan federasi dilakukan oleh senat yang berasal dari utusan perwakilan anggota federasi yang hadir pada kongres, mempunyai hak suara dan hak bicara. Tepat pada pukul 15.20 WIB hari dan tanggal di atas disahkan struktur federasi.

Kelima, pada pukul 15.30 dilanjutkan dengan pemilihan pengurus federasi (ketua, sekretaris jendral, dan bendahara). Proses pun berjalan dengan diajukannya oleh peserta kandidat nama-nama seperti (Mardiana, Ade Indriani, Lely Zailani, Rusmiani Saragih, Sutini, dan Sutarni). Pemilihan disepakati dilakukan dengan cara aklamasi dengan urutan: pertama pemilihan ketua, kedua sekretaris, lalu bendahara. Terpilihlah nama-nama sebagai berikut: Lely Zailani (ketua), Mardiana Andi (sekretaris jendral), dan Rusmiani saragih (bendahara). Kemudian hasil pemilihan pengurus federasi yang diberi nama Dewan Eksekutif Federasi (DEF) tersebut disahkan oleh kongres pada pukul 15.55.

Pengurus federasi terpilih untuk periode 2001 sampai dengan 2004. Dengan terpilihnya pengurus federasi maka agenda kongres selesai. Pada pukul 20.00 malam itu, dengan resmi kongres I federasi dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan selesainya pelaksanaan kongres, pada tanggal 11 November 2001 dilangsungkan deklarasi berdirinya federasi di pendopo kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. (Notulensi Kongres I FSPM, 2001:1-16).



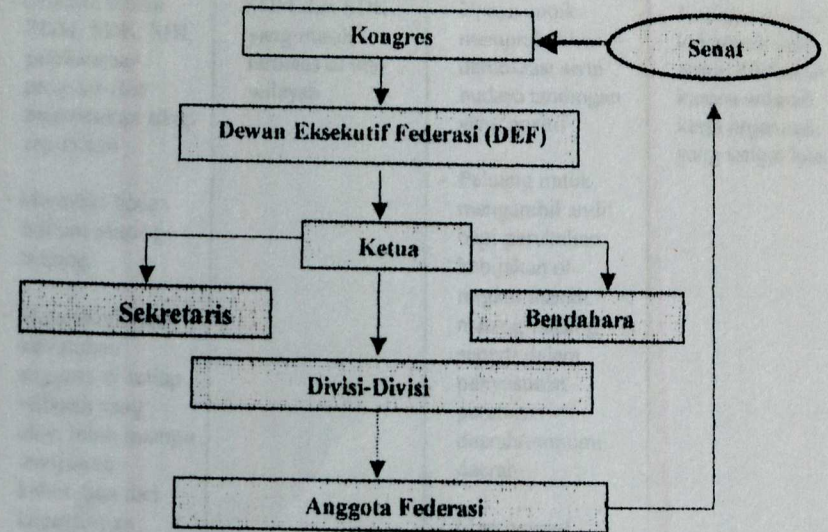
B. Analisis Pengembangan Federasi Serikat Perempuan Merdeka

Menurut anggaran dasar yang telah disahkan dalam Kongres I FSPM, syarat untuk menjadi anggota federasi adalah: (1) organisasi perempuan yang beranggotakan sedikitnya 20 orang kaum perempuan, (2) memiliki badan hukum, (3) mendaftar secara tertulis untuk menjadi anggota federasi, (4) mendapat rekomendasi dari salah seorang anggota terdahulu serta melampirkan surat rekomendasi tersebut, dan (5) menyatakan persetujuannya secara tertulis terhadap visi dan misi federasi.

Hingga perkembangan tahun 2002, organisasi perempuan yang menjadi anggota FSPM adalah: (1) Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Sedang, (2) Serikat Perempuan Independen (SPI) Simalungun, (3) Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu, (4) Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang, dan (5) Perserikatan OWA (Orientasi Wanita dan Anak) Palembang.

Pengambilan keputusan tertinggi pada FSPM dilakukan melalui kongres yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Peserta kongres berasal dari perwakilan anggota (senat) dari setiap federasi. Kongres dilakukan untuk mengangkat atau memberhentikan Dewan Eksekutif Federasi (DEF). Bagi setiap anggota FSPM ada Dewan Pengawas Organisasi (DPO) yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan melalui kongres. DPO inilah yang mengawasi kerja-kerja Dewan Pengurus Harian (DPH) di lapangan. Sehingga pada intinya DPO ini bekerja untuk federasi. Dari sebagian perwakilan yang diunjuk oleh tiap anggota federasi dibentuk senat. Lebih jelasnya struktur organisasi dan keanggotaan Hapsari-Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) dapat dilihat di bawah ini:



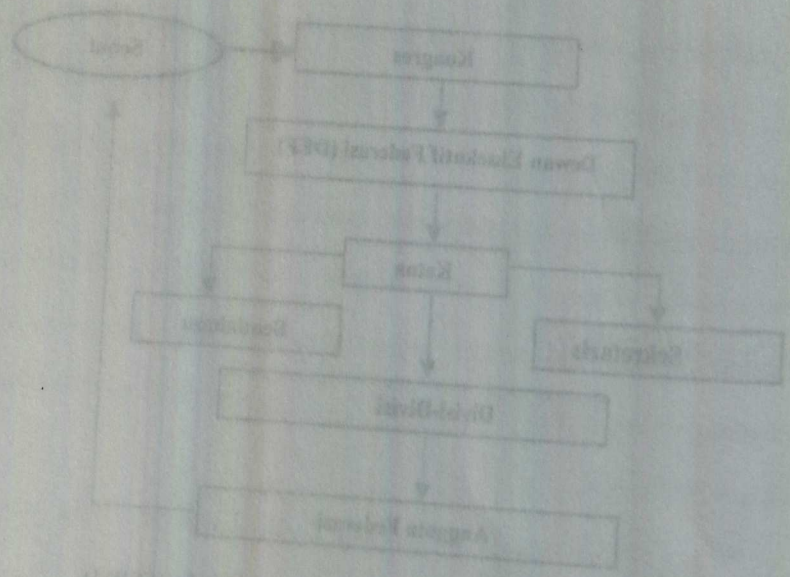


Gambar: Bagan Struktur Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM).

Melalui berbagai hasil analisis tentang format organisasi perempuan dengan memperhatikan situasi perkembangan masyarakat, maka bentuk federasi merupakan format organisasi yang dipandang paling tepat. Hasil analisis internal lembaga tentang bentuk federasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.1
Hasil Analisis Bentuk Federasi

| Kekuatan | Kelemahan | Peluang | Ancaman |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai visi dan misi yang sama - Peluang bagi independensi dalam hal pengambilan keputusan | <ul style="list-style-type: none"> - Persaingan dan munculnya rasa kedaerahan - Kecenderungan penyempitan wawasan | <ul style="list-style-type: none"> - Setiap wilayah mampu untuk membangun jaringan masing-masing dengan lembaga lain | <ul style="list-style-type: none"> - Pihak luar akan mudah masuk ke wilayah-wilayah tanpa koordinasi dengan kepemimpinan di tingkat pusat sehingga mudah melakukan upaya memecah belah |



| | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Otonom dalam SDM, SDK, SDI, pelaksanaan program dan menentukan sikap organisasi - Memiliki badan hukum masing-masing - Mengakomodasi kebutuhan anggota di setiap wilayah yang akan lebih mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan anggota di tingkat lokal | <ul style="list-style-type: none"> - SDM dan SDK yang masih terbatas di tiap wilayah | <ul style="list-style-type: none"> - Upaya untuk mempraktikkan demokrasi serta budaya tandingan yang positif - Peluang untuk mengambil andil bagi perubahan kebijakan di tingkat daerah masing-masing seperti dalam penyusunan peraturan daerah/otonomi daerah - Merangsang munculnya kepemimpinan yang berlapis sehingga sulit untuk dihancurkan | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar kelompok sulit untuk dilakukan karena wilayah kerja organisasi yang sangat luas. |
|--|---|--|---|

Sumber: Hasil Analisis Internal SPI dan Hapsari.

Berdasarkan hasil analisis internal tersebut dipahami bahwa dipilihnya bentuk federasi untuk mengemban misi: (1) mewujudkan wadah perjuangan bersama kaum perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan yang independen untuk menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan gender, (2) memfasilitasi serta mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi perempuan pedesaan yang akan memperjuangkan upaya penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan terutama bagi anggota, dan (3) membangun mekanisme kerja organisasi dan kepemimpinan kaum perempuan pedesaan yang lebih demokratis dan independen.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi yang ditemukan di lapangan, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Terbentuknya Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) tidak dapat dipisahkan dari Serikat Perempuan Independen (SPI) dan yayasan Hapsari. Dapat dikatakan bahwa federasi ini dibentuk dari anggota dan kelompok-kelompok perempuan dampingan yayasan Hapsari.
2. Pada proses perjalanannya dirasakan penting akan adanya perubahan bentuk dan mekanisme kepengurusan organisasi agar tidak tumpang tindih, tidak sentralistik, serta tidak meminggirkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Di samping itu, muncul pemikiran akan lahirnya sebuah organisasi yang lebih aspiratif bagi kepentingan anggotanya maka hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Federasi Serikat Perempuan Merdeka.
3. Berdasarkan hasil analisis dipahami bahwa dipilihnya bentuk federasi untuk:
(1) mewujudkan wadah perjuangan bersama kaum perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan yang independen untuk menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan gender, (2) memfasilitasi serta mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi perempuan pedesaan yang akan memperjuangkan upaya penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan terutama bagi anggota, dan (3) membangun mekanisme kerja

organisasi dan kepemimpinan kaum perempuan pedesaan yang lebih demokratis dan independen.

B. Saran-Saran

Peneliti mengajukan beberapa saran yang penting untuk dipertimbangkan oleh pengurus Federasi Serikat Perempuan Merdeka, yaitu:

1. Sebagai sebuah ormas perempuan yang berbentuk federasi, hendaknya Federasi Serikat Perempuan Merdeka merumuskan model dan strategi koordinasi organisasi yang jelas. Untuk menghindari konflik internal antar anggota federasi disebabkan luasnya wilayah kerja organisasi.
2. Pengurus federasi dalam hal ini harus terus melakukan strategi pembinaan dan pemberdayaan anggota federasi sebagai konsekuensi semakin bervariasinya kebutuhan dan pelaksanaan program organisasi.

• DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irwan (editor). (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3.
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadar, Ivan A. (2001). "Feminisme, Feminisme Laki-Laki dan Wacana Gender dalam Upaya Pengembangan Masyarakat". *Jurnal Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Hapsari. (2001). "Diskusi Membangun Gerakan Perempuan" dalam *Suara Hapsari* No. 17-18/Th. IV/Julii-Desember. Perbaungan Sumatera Utara: Yayasan Hapsari.
- Hapsari-Federasi Serikat Perempuan Merdeka. Notulensi Kongres I Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) Sumatera Utara (Lubuk Pakam, 8-10 Nopember 2001) dan Notulensi Deklarasi Berdirinya Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM) Sumatera Utara (Medan, 11 Nopember 2001).
- Hidayati, Siti. (1992). "Beberapa Perspektif Feminisme dalam Menganalisis Permasalahan Wanita". *Jurnal Antropologi Indonesia* No.50 Th.XVI September-Desember. Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Mar'iyah, Chusnul. (2001). "Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan". *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 6 No. 1 Februari. Bandung: Akatiga.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ollenburger, Jane C. dan Moore, Helen A. (terjemahan Sucahyono dan Sumaryana). (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.

